

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

# Pendapatan DKI Naik Jadi Rp 67,3 Triliun

**Serapan anggaran tahun 2022 yang tecermin dalam pos belanja daerah ini menunjukkan adanya geliat ekonomi di Jakarta yang terus tumbuh.**

JAKARTA - Realisasi pendapatan DKI Jakarta tahun 2022 meningkat menjadi 67,3 triliun dari tahun 2021 sebesar 65,6 triliun atau meningkat 1,8 triliun rupiah. "Pengelolaan APBD pada situasi pemulihan pandemi seperti 2022 cukup menantang," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, di Jakarta, Kamis (5/1).

Michael mengatakan realisasi pendapatan daerah mencapai 85,56 persen dari target 77,8 triliun. Sedangkan kinerja belanja daerah per 31 Desember 2022 mencapai 64,9 triliun atau 84,32 persen dari anggaran 76,9 triliun. Realisasi ini naik 3,3 triliun dari belanja daerah tahun 2021 yang terse- rap 61,6 triliun.

"Pengelolaan saat pandemi 2022 memang menantang, tapi dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana, realisasi pendapatan dan serapan lebih baik dari tahun sebelumnya," ujar Michael.

Michael menjelaskan pos pendapatan daerah yang mencapai 67,3 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini terutama dari Pajak Daerah (40,3 triliun). Pendapatan Retribusi Daerah (376,4 miliar), pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (402,4 miliar), dan pendapatan lain-lain PAD yang sah (4,6 triliun).

"Untuk Pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai 18,9 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah mencapai 2,8 triliun. Kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengun-

rangan PBB-P2, penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong kenaikan realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta," jelas Michael.

Michael mengatakan serapan anggaran tahun 2022 yang tecermin dalam pos belanja daerah ini menunjukkan adanya geliat ekonomi di Jakarta yang terus tumbuh. "APBD DKI Jakarta senantiasa dikelola secara andal untuk masyarakat dan dapat menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi Jakarta dan Indonesia," tutur Michael.

## Fasilitas UMKM

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Center for Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan perlu difasilitasi lebih banyak lagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terutama di sektor usaha yang cukup diminati pascapandemi seperti kuliner dan wisata.

Bhima menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta agar

memprioritaskan pengendalian terhadap inflasi dengan kerja sama lebih luas antara BUMD dan petani daerah penghasil pangan. "Cara untuk memotong rantai pasok dan menjaga harga adalah dengan bermitra daerah sumber pangan," ujar Bhima.

Menurut Bhima, kesempatan kerja perlu didorong dengan kolaborasi pelaku usaha dan Pemprov DKI Jakarta. Misalnya aktif menyelenggarakan berbagai event agar masyarakat makin banyak belanja. Selain itu, kata Bhima, industri makanan minuman skala kecil, jasa perhotelan, jasa sewa transportasi, periklanan, percetakan hingga sektor pakaian jadi juga difasilitasi.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan prioritas penanganannya ekonomi DKI Jakarta bagaimana memastikan bantuan sosial didistribusi dengan baik. Kemudian ada beberapa peningkatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga bagian

dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta.

"Kemudian pengendalian harga-harga di pasar menjadi bagian upaya membantu usaha UMKM," ujar Badiul. Menurutnya, selama ini sektor UMKM sering mengalami problem permodalan. Selama dua tahun kemarin sempat lesu. Kemudian, akses pasar perlu difasilitasi dengan baik.

"Karena akses pasar juga menjadi problem UMKM. Itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah," jelas Badiul. Menurut Badiul, perlu mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas, misalnya, penguatan dan pemberdayaan UMKM. Ini terutama dari sisi permodalan dan membuka akses pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta perizinan usaha." Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat, menstabilkan harga bahan pokok, dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin juga perlu dipertahankan," tandasnya.

■ jon/G-1